



Analisis Upaya Peningkatan Fasilitas Di Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Nanda Riesta Nathania¹, Zakiya Az Zikra Ismail²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Abstrak

Received: 07 Juni 2024
Revised: 13 Juni 2024
Accepted: 20 Juni 2024

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan berbagai macam bantuan dan fasilitas yang diberikan untuk masyarakat. Hal ini yang dinilai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ada hal yang dapat dicermati di bidang hukum yaitu ada dari sisi pembentukan regulasi, memberikan layanan hukum termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Adanya laporan masalah dari masyarakat seperti sengketa tanah. Selain itu ditegaskan kembali bagaimana cara memperoleh pengadilan, pembangunan bidang hukum, penanganan perkara, memberikan akses keadilan, dan ada juga kegiatan program HAM yaitu dari pusat. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk memberikan dan menggambarkan informasi yang terjadi di lapangan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah banyak memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya yaitu salah satu caranya adalah dengan memberikan pelayanan dan akses sarana prasarana yang optimal.

Keywords: *Regulasi, Hak Asasi Manusia, Sarana Prasarana*

(*) Corresponding Author: nandariestanathania@students.unnes.ac.id
azzikrazakiya@students.unnes.ac.id

How to Cite: Nathania, N., & Ismail, Z. (2024). Analisis Upaya Peningkatan Fasilitas Di Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 504-507. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12771122>

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memegang peran strategis dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menyokong pertumbuhan tersebut, fasilitas-fasilitas publik menjadi unsur krusial yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat. Upaya peningkatan fasilitas di Jawa Tengah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak yang harus dijalankan dengan beralaskan aspek hukum administrasi negara atau HAN.

Dalam sudut pandang HAN, peningkatan fasilitas umum di Jawa Tengah memerlukan analisis yang teliti dan akurat terkait dengan landasan hukum, prosedur administrasi, dan keadilan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan fasilitas ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik semata, melainkan juga melibatkan pengaturan, pengelolaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat.

Keberhasilan peningkatan fasilitas di Jawa Tengah juga bergantung pada efisiensi dan efektivitas dalam penerapan regulasi-regulasi yang berlaku. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa upaya peningkatan fasilitas tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang berlaku.

Selain itu, perlindungan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan akses dan pemanfaatan fasilitas juga perlu menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan ini. Hukum administrasi negara menempatkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keterbukaan sebagai pijakan utama dalam menyusun kebijakan, mengelola fasilitas, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lantas bagaimana upaya Pemprov Jawa Tengah Memberikan Layanan Sarana dan Prasarana yang baik kepada masyarakat? Bagaimana juga cara upaya Pemprov Jawa Tengah memenuhi HAM kepada para pekerja khususnya perempuan?

Dalam studi ini penulis menganalisis dalam perspektif HAN, penulis memahami tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam upaya peningkatan fasilitas di Provinsi Jawa Tengah dan mencari solusi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa peningkatan fasilitas ini bukan hanya akan mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan tetapi juga akan menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

METODE

Metode penelitian merupakan teknik atau cara yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian ialah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Dalam metode penelitian terdapat prosedur, langkah-langkah, atau tata cara yang sistematis dalam memperoleh, mengolah, dan menganalisis data.

metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang diamati. penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata, gambar, tidak menggunakan angka, dari hasil wawancara atau perilaku orang-orang yang diamati. contoh dari metode penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, riset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana cara Pemprov Jawa Tengah memberikan layanan sarana prasarana kepada masyarakat?

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangatlah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya, wilayah pendukung perekonomian masyarakat Semarang sangatlah pesat, untuk itu diperlukan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat warga Semarang dan sekitarnya. Pihak Pemprov Jawa Tengah menegaskan bahwa pihak Pemprov Jawa Tengah memberikan layanan publik di kantor atau tempat umum seperti adanya tangga untuk orang difabel.

Ada pula terdapat juga di Puskesmas tempat bermain anak dan kamar mandi anak. Hal ini dibentuk karena dengan banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk berobat ke puskesmas terdekat salah satu alasannya karena jumlah biaya tidak mahal. Selain itu, Pemprov juga menyediakan kamar mandi difabel di tempat-tempat umum seperti kantor, mall, dan tempat rekreasi lainnya atau tempat yang banyak didatangi masyarakat. Di sisi lain, pemenuhan hak asasi masyarakat mengenai sarana prasarana yang didapatkan ini semua termasuk dengan adanya bentuk-

bentuk pemenuhan HAM di tempat umum. Selain disediakan tempat khusus untuk difabel dan anak-anak terdapat pula ruang rokok di tempat umum seperti kantor, mall, tempat yang banyak didatangi oleh anak kecil dan orang yang sudah berusia. Tujuan dibuatnya ruangan bebas asap rokok adalah agar masyarakat lebih baik dan mampu menjaga orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah selalu memberikan laporan setiap 4 bulan sekali ke Kemenkumham tentang apa saja yang sudah terlaksana dan sudah dapat diakses oleh masyarakat.

Bagaimana cara Pemprov Jawa Tengah memenuhi HAM dalam pada pekerja khususnya perempuan?

Pemprov Jawa Tengah memberikan pelayanan yang sangat baik khususnya dalam pekerja yang melibatkan tenaga kerja seorang perempuan. Yaitu dengan cara dipermudahnya pengajuan cuti pada saat hamil, bersalin, atau bahkan menikah.

Pemprov Jawa Tengah mewajibkan dan menerapkan UU Ketenagakerjaan. Aturan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan dapat memberikan waktu cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan.

Penerapan yang telah dilakukan Pemprov Jawa Tengah ini sudah sesuai dengan Hak Asasi Manusia khususnya di tenaga kerja perempuan. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua ibu hamil yang akan melahirkan. Peraturan ini sudah baik dilakukan dan memberikan pengaruh besar dalam kinerja pegawai.

Selain itu, Pemprov Jawa Tengah memberikan cara memperoleh pengadilan, pembangunan dalam bidang hukum dengan meningkatkan regulasi yang sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi, adanya penanganan perkara oleh masyarakat, memberikan akses keadilan, dan terdapat pula adanya kegiatan program HAM yaitu dari pusat, dan dari hukum sebagai pembina HAM bersama Kemenkumham, dan terdapat program peduli kota terhadap HAM dari Pusat, ada pelaporan ke Kemenkumham itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan observasi yang telah kami lakukan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil memberikan layanan sarana prasana yang baik dan memadai kepada masyarakat Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan fasilitas seperti ruangan bebas asap rokok, ruangan bermain anak, toilet untuk para difabel di area area tempat-tempat umum seperti mall, kantor, taman dan area area umum lain nya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah berhasil dalam pemenuhan HAM pekerja terutama pekerja wanita, contoh nya yaitu dengan adanya kebijakan pemberian cuti sebelum dan sesudah melahirkan. selain itu upaya lain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan HAM adalah menjunjung tinggi keadilan memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk memproses perkara di pengadilan, dan terdapat juga program HAM yang dapat disalurkan lanjut ke KEMENKUMHAM.

SARAN

Dengan disampaikannya terkait analisis upaya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang sudah Pemprov Jawa Tengah lakukan adalah alangkah baiknya

untuk mengoptimalkan hal-hal yang akan membawakan dampak yang lebih besar bagi masyarakat adalah dengan cara menggunakan peningkatan penanaman modal agar dalam upaya pembangunan sarana dan prasarana membutuhkan banyak dana yang sudah disediakan dan tentunya disiapkan untuk modal pembangunan tersebut. Kemudian untuk masyarakat sendiri adalah dengan menggunakan daya pakai yang baik dan mampu menggunakan dengan bijak atas apa yang sudah disediakan oleh Pemerintah atau Badan Pembangunan Daerah.

Untuk itu, dengan peningkatan daya optimal yang Pemprov Jawa Tengah lakukan akan memberikan dampak positif dan hasil yang baik. Peningkatan sarana dan prasarana dapat meningkatkan nilai mutu pendidikan dan SDM yang baik, yang akan memunculkan bibit-bibit baik pula untuk terciptanya suatu pelajar yang berkualitas.

Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan kinerja untuk menyeimbangkan antara modal dan persiapan sarana prasarana agar hasil dari tujuan dibangunnya sarana prasarana bekerja dan menghasilkan hasil yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah yang berjudul “**Analisis Upaya Peningkatan Fasilitas Di Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan dituliskannya artikel ini semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan penulis mohon dimaafkan. Terimakasih kepada para yang terhormat

1. Bapak Laga Sugiarto, S.H., M.H selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara.
2. Bapak ZRP.TJ. MULYONO, SH. MH Analis Hukum Ahli Madya / Koordinator Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
3. orang tua penulis yang senantiasa mendoakan pen

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Samsu Alam, A. (2016). Isu-Isu Strategis dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. *Jurnal Kesehatan Komunitas* 7, 95-102.
- ELISABETH DETA LUSTIYATI, M. E. (2019). AKSESIBILITAS SARANA SANITASI BAGI DIFABEL DI TEMPAT TRANSPORTASI UMUM. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 94-96.
- Pulungan, A. Z. (2020). PELAYANAN PUBLIK DALAM KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA. *JURNAL UNIVERSITAS DHARMAWANGSA*, 32-33.
- Sumengen Sutomo, A. A. (2021). Analisis Manajemen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu. *Jurnal Kesehatan Komunitas* 7, 45-46.